

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Diskripsi Responden**

Penelitian ini telah mengambil sejumlah responden dianggap mampu dan mempunyai pengetahuan serta terlibat langsung pada saat Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2015. Adapun responden yang mengisi kuesioner adalah Pimpinan Muhammadiyah Sleman dan Pimpinan Aisyiyah Sleman serta AMM khususnya Pemuda Muhammadiyah dan Nasyyatul Aisyiyah tingkat daerah yang sebagian dari mereka menjadi anggota tim sukses untuk Sri Purnomo pada pilkada 2010 dan 2015 yang diberi Surat Keputusan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman.

Pemilihan responden ini juga disebar merata sesuai dengan jumlah anggota yang ada di lingkungan Muhammadiyah Sleman. Diketahui bahwa ada sejumlah 264 anggota yang tersebar di PDM, PDM, PDA dan PCA meskipun hanya 199 anggota yang aktif. Persebaran responden ini juga mengarah pada jumlah komposisi anggota aktif yang tersebar di Pimpinan Daerah maupun Cabang Muhammadiyah/Aisyiyah. Keberadaan PCA Kab Sleman ini juga sangat membantu persebaran responden. Pasalnya dari jumlah anggota PCA sebanyak 119 anggota ini ada sebanyak 99 anggota aktif.

Keberadaan PCM dan PCA ini sangat membantu dalam penelitian ini karena jumlah anggota aktif yang dimiliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan PDM dan PDA yang jika diukur persentasinya hanya 5% dari jumlah anggota Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah/Aisyiyah. Berikut ini adalah hitungan prosentasi yang diambil untuk dijadikan sample responden pada penelitian ini:

No	Anggota	Jumlah Anggota (Orang)	Anggota Aktif (Orang)	(%) Persentase
1	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	13	10	5%
2	Pimpinan Cabang Muhammadiyah	119	80	40%
3	Pimpinan Daerah Aisyiyah	13	10	5%
4	Pimpinan Cabang Aisyiyah	119	99	50%
<b>TOTAL</b>		<b>264</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Diolah Penulis

#### **Tabel 4.1 Total Pimpinan Muhammadiyah/Aisyah di Sleman**

Namun dalam kenyataannya, karena perangkapan jabatan (PDM dengan PCM) dan faktor ketidakaktifan secara individu, maka data riil yang kategori ajeg berjumlah hanya 199 orang. Secara keseluruhan, kehadiran Pimpinan Muhammadiyah sebagai responden dan mengisi questioner diperlukan dalam tiga kurun waktu yang

berbeda. Yang pertama responden diminta mengisi karena yang bersangkutan hadir di saat-saat rapat dan pengajian di lingkungan Muhammadiyah. Yang kedua sebagian responden didatangi ke rumah tempat tinggalnya untuk dimohon mengisi questioner. Yang ketiga responden sengaja diundang untuk hadir pada acara khusus mengisi questioner dan dilanjutkan buka puasa pada hari Ahad, 10 Juni 2018 di kantor PDM Sleman.

PDM Sleman, PDA Sleman dan sebagian AMM tersebut sebagai responden yang mengembalikan kuesioner adalah sebanyak sekitar 210 responden, tetapi sejumlah sebelasan responden tidak mengisi karena tidak mampu mengisi dan merasa hanya aktif di unsur pembantu pimpinan. Artinya adalah bahwa semua dari total responden yang ditarget telah mengembalikan kuesioner secara lengkap dan maksimal. Untuk deskripsi responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	178	89.5 %
2	Perempuan	21	10.5 %
<b>JUMLAH</b>		<b>199</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data diolah penulis, 2018*

**Tabel 4.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada Tabel 4.2. Mengenai responden berdasarkan jenis kelamin dapat terlihat bahwa responden terbesar adalah dari unsur Pimpinan Muhammadiyah yaitu sejumlah 178 orang dan telah ada di dalamnya unsur dari AMM sebagai tersebut di atas. Sedangkan total responden

berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 21 orang yang terdiri dari sebagian besar adalah Anggota Pimpinan Aisyiyah baik dari PDA maupun PCA.

Selanjutnya adalah data responden yang telah dikategorikan dalam kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

<b>NO</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	21 - 30	19	9.5 %
2	31 – 40	32	16 %
3	41 – 50	49	24.5 %
4	51 - 60	61	30.5 %
5	61 - 70	26	13 %
6	71 - 80	14	7.5 %
<b>JUMLAH</b>		<b>199</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data diolah penulis, 2018*

#### **Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia**

Kesan pertama setelah membaca data usia para Pimpinan Muhammadiyah Sleman adalah bahwa *orchestra* kepemimpinannya itu sangat bagus. Dominasi usia muda menjadikan dinamika yang tinggi dan sekaligus terkadali dan bijaksana karena adanya peran kelompok usia yang benar-benar sudah matang dan berpengalaman. Sebenarnya, Kyai Dahlan sang pendiri Muhammadiyah menurut catatan sejarah, beliau meninggal dalam usia 53 tahun. Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang berusia 21 hingga 50 tahun ada 50 %, yang kelompok 51 hingga 60 tahun ada 30,5 %. Secara hitungan jumlah dan perbandingannya hal ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi cukup berjalan dan mampu menciptakan kesinambungan kepemimpinan disbanding jika jumlahnya terbalik, maka berarti jumlah kader yang

muda lebih sedikit sedang yang tua lebih banyak.jumlahnya. Anggota Pimpinan yang berusia 61 hingga 80 terdapat 20 % itu artinya menunjukkan bahwa Muhammadiyah “orchestra” kepemimpinan Pimpinan Muhammadiyah Sleman dapat dikatakan ideal karena terdiri dari berbagai kelompok umur komposisi usia sangat muda dominan, usia muda masih berperan dengan jumlah yang lebih sedikit, dan usia tua paling sedikit jumlahnya dan masih berperan.

Pada keterangan selanjutnya adalah data responden berdasarkan tingkat pendidikan. Data ini perlu disajikan karena memang untuk melihat bagaimana pendidikan yang dimiliki oleh responden yang ada dalam skop Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Sleman.

No	Pendidikan		
	Tingkatan	Jumlah	Percent (%)
1	SMP	1	0.50 %
2	SMA	19	9.50 %
3	D3	8	4%
4	S1	126	63.50 %
5	S2	42	21%
6	S3	3	1.50 %
Total		199	100%

*Sumber : Data diolah penulis, 2018*

**Tabel. 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan**

Dari tabel 4.4 mengenai data responden berdasarkan pendidikan terlihat bahwa responden yang tertinggi jumlahnya adalah pada pendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 126 orang dan Strata2 (S2) berjumlah 42 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan

Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pada umumnya adalah berpendidikan Tinggi/sarjana yaitu terlihat dengan banyaknya yang menjadi responden dengan pendidikan S1. Kondisi demikian menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah memang mampu melahirkan pimpinan untuk kepemimpinannya. Dalam teori sosial dijelaskan bahwa “Leader are made and not born”. Artinya pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya kodrati. Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup (Subagja, S. 2010). Sedangkan responden yang paling sedikit adalah pada pendidikan SMP yang hanya ada 1 orang.

Selanjutnya adalah data responden berdasarkan pekerjaan setiap Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Dapat dilihat pada tabel 4.5. dibawah ini :

No	Pekerjaan		
	Jenis	Jumlah	Percent (%)
1	Advokat	1	0.50 %
2	Asisten	1	0.50 %
3	Bidan	1	0.50 %
4	BUMD	1	0.50 %
5	Buruh	1	0.50 %
6	Dokter	2	1%
7	Dosen	12	6%
8	Guru	64	31.50 %
9	Karyawan Swasta	13	6.50 %

10	Konsultan	1	0.50 %
11	Kordinator	1	0.50 %
12	Mahasiswa	2	1%
13	Pelatih	1	0.50 %
14	Pendidik	1	0.50 %
15	Pensiunan	25	12.50 %
16	Perangkat Desa	4	2%
17	PNS	29	14%
18	Purnakarya	1	0.50 %
19	Rumah Tangga	5	2.50 %
20	Wiraswasta	33	17%
Total		199	100%

*Sumber : Data diolah penulis, 2018*

**Tabel. 4.5. Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Dari tabel 4.5 mengenai data responden terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan, namun yang paling dominan adalah responden yang berprofesi sebagai Guru yaitu sebanyak 64 orang. Sedangkan responden yang paing sedikit adalah berprofesi sebagai Pelatih, Pendidik, Buruh, BUMD, Advokad, dan Bidan yaitu sebanyak 1 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Pimpinan Muhammadiyah di Sleman Sleman terdiri dari berbagai macam bidang pekerjaan, meskipun yang dominan adalah pada Profesi Guru. Guru berarti dapat dikatakan sebagai unsur utama yang memimpin Muhammadiyah dan disusul PNS dan Dosen. Tiga profesi tersebut menjadi inspirator dan sekaligus sebagai penggerak Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bahkan Sri Purnomo sang Bupati yang terpilih dua kali berturut-turut adalah seorang guru yang masih aktif.

## 4.2. Uji Validasi

Berdasarkan dengan hal yang telah didapatkan, hasil dari penelitian ini diantaranya sseperti berikut ini:

		Perilaku	Modal	Organisasi	Agama	Informasi
Perilaku	Pearson Correlation	1	,657(**)	,487(**)	,714(**)	,599(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	199	199	199	199	199
Modal	Pearson Correlation	,657(**)	1	,463(**)	,567(**)	,473(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	199	199	199	199	199
Organisasi	Pearson Correlation	,487(**)	,463(**)	1	,512(**)	,419(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	199	199	199	199	199
Agama	Pearson Correlation	,714(**)	,567(**)	,512(**)	1	,465(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	199	199	199	199	199
Informasi	Pearson Correlation	,599(**)	,473(**)	,419(**)	,465(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	199	199	199	199	199

Sumber : diolah oleh penulis

### Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi Menggunakan AMOS

Namun dalam kenyataannya, karena perangkatan jabatan (PDM dengan PCM) dan faktor ketidakaktifan secara individu, maka data riil yang kategori ajeg berjumlah hanya 199 orang. Secara keseluruhan, kehadiran Pimpinan Muhammadiyah sebagai responden dan mengisi

questioner diperlukan dalam tiga kurun waktu yang berbeda. Yang pertama responden diminta mengisi karena yang bersangkutan hadir di saat-saat rapat dan pengajian di lingkungan Muhammadiyah. Yang kedua sebagian responden didatangi ke rumah tempat tinggalnya untuk dimohon mengisi questioner. Yang ketiga responden sengaja diundang untuk hadir pada acara khusus mengisi questioner dan dilanjutkan buka puasa pada hari Ahad, 10 Juni 2018 di kantor PDM Sleman. Berdasarkan dengan hasil amos yang dilakukan pada penelitian ini didapati bahwa uji validasi pada penelitian ini dikatakan valid. Diantaranya adalah dapat dilihat bahwa keempat modal tersebut mempunyai nilai lebih dari 0.01. Pengaruh Keaktifan dalam Organisasi, Agama, Informasi dan Modal Sosial Terhadap Perilaku Memilih. Dari hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut bahwa standard deviasi keaktifan dalam organisasi paling tinggi adalah 5,48 yang diikuti dengan informasi politik 4,64; modal sosial sebesar 4,49 perilaku memilih 3,77 serta yang paling rendah adalah agama sebesar 2,68.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Organisasi	199	12	50	39,73	5,482
Agama	199	14	30	26,38	2,686
Informasi	199	16	39	30,07	4,646
Modal	199	22	45	37,21	4,495
Perilaku	199	16	35	28,90	3,770
Valid N (listwise)	199				

#### **Tabel 4. 7 Hasil Statistika AMOS**

Pengaruh keaktifan dalam organisasi, agama, informasi dan modal sosial terhadap perilaku memiliki dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa standard deviasi keaktifan dalam organisasi paling tinggi adalah 5,48 yang diikuti dengan informasi politik 4,64; modal sosial sebesar 4,49 perilaku memilih 3,77 serta yang paling rendah adalah pengaruh agama sebesar 2,68.

#### **4.3 Diskripsi Variabel**

Maka dari itu organisasai masuk kedalam salah satu variabel penelitian ini, untuk melihat bagaimana kecenderungan perilaku pemilih pada indikator Organisasi pada tabel 4.7 dibawah ini :

Kategori	Organisasi	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	109	54,8 %
Setuju	72	36,2 %
Cukup Setuju	9	4,5 %
Kurang Setuju	3	1,5 %
Tidak Setuju	6	3 %
Jumlah	199	100 %

*Sumber : Data diolah Penulis, 2018*

#### **Tabel 4.8 Variabel Organisasi**

Pada tabel 4.8 mengenai indikator Organisasi dapat terlihat bahwa pada umumnya Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kabupaten Sleman sebagai responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa 109 responden atau 54,8% menyatakan Sangat Setuju jika memilih calon berdasarkan kesamaan organisasi yang diikuti menjadi pertimbangan dalam memilih kepala daerah. Sedangkan Responden

yang menyatakan Setuju dalam dalam memilih calon kepala daerah ada sebanyak 72 orang atau sebesar 36,2%. Serta dengan jawaban Cukup Setuju ada sebanyak 9 orang atau 4,5%

Jawaban responden yang menjawab Kurang Setuju sebanyak 3 orang atau 1,5% dan yang menjawab Tidak Setuju ada sebanyak 6 orang atau 3%. Jadi pada dasarnya terlihat bahwa memang meskipun sebagai Pimpinan Muhammadiyah namun masih ada yang memilih tidak berdasarkan organisasi yang dapat terlihat dari hasil Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju.

Jadi pada indikator Organisasi sebagai salah satu faktor dalam memilih saat Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Organisasi Muhammadiyah, yang mana Sri Purnomo sebagai salah satu kader serta pernah menjabat sebagai Pimpinan di Daerah Sleman. Maka dapat dijelaskan bahwa masih ada kecenderungan memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman pada tahun 2010 dan 2015 karena faktor Organisasi. Maka dari itu pada tabel 4.9 dibawah ini akan menyajikan data mengenai indikator Agama terhadap perilaku memilih pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pada Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015, sebagai berikut :

Kategori	Agama	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	107	53,8%
Setuju	82	41,2%
Cukup Setuju	8	4%
Kurang Setuju	2	1%
Tidak Setuju	0	0
Jumlah	199	100 %

*Sumber : Data diolah Penulis, 2018*

**Tabel 4.9 Variabel Agama**

Pada tabel 4.9 dapat terlihat bahwa adanya kecenderungan yang sangat besar para pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam memilih Sri Purnomo karena berdasarkan Agamanya. Terlihat dari jawaban Responden yang menyatakan Sangat Setuju dalam memilih calon pemimpin berdasarkan Agamanya sebanyak 107 orang atau 53,8%. Jumlah ini sudah mencapai lebih dari setengah responden yang memberikan jawaban tersebut. Selanjutnya jawaban Setuju ada sebanyak 82 orang atau 41,2% memilih Agama sebagai salah satu faktor dalam memilih. Serta Responden yang menjawab Cukup Setuju ada sebanyak 8 orang atau 4%.

Untuk responden yang menjawab dengan jawaban Kurang Setuju ada sebanyak 2% dan tidak ada responden yang memberikan Jawaban Tidak Setuju. Maka dari itu dapat terlihat hampir keseluruhan Jawaban dari Responden Sangat Setuju dan Setuju bahwa Faktor agama menjadi indikator dalam melakukan Pilkada tahun 2010 dan 2015 yang lalu.

Secara teoritis, Ivancevich, dkk (2005) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai sebuah studi perilaku, sikap, dan kinerja manusia dalam lingkungan organisasi; berdasarkan teori, metode, dan prinsip dari disiplin seperti Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi Budaya dan Politik untuk belajar mengenai persepsi individu, nilai, dan tindakan bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara total; menganalisis dampak lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber daya manusia, tujuan, dan strategi organisasi.

Pada organisasi yang telah memiliki tujuan bersama dalam yang menjadikan landasan untuk menjalankan organisasi tersebut sebenarnya telah menjelaskan hakikat organisasi yang memiliki sifat berkelompok, baik dalam ikatan hidup bermasyarakat, maupun menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan formal yang tersusun dan tertata, sedangkan sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir (Soekanto, 1977:94)

Faktor dasar yang akan mempererat tali kekeluargaan antara anggota dalam suatu kelompok organisasi kemasyarakatan adalah adanya kebersamaan, senasib sepenanggungan, guna mencapai tujuan bersama. Maka dari itu suatu organisasi dapat membentuk perilaku memilih karena telah memiliki rasa kebersamaan yang kuat demi mewujudkan apa yang ingin dicapainya. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_5 - Z_2$  sebesar 0.714 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima. Agama

dijadikan salah satu indikator dalam penelitian ini karena memang sebagai Indonesia yang terdiri dari beberapa Agama yang diakui oleh Negara serta mampu juga dalam mempengaruhi perilaku memilih di masyarakat.

Hal tersebut tidak terlepas dari Calon Bupati saat ini Sri Purnomo yang beragama mayoritas di Sleman yaitu Islam yang mencalonkan diri. Sri Purnomo juga sudah dikenal sebagai salah satu Pengurus Ormas Islam terbesar yang ada yaitu Muhammadiyah, maka dari itu sangat tidak heran jika para Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sleman juga mempertimbangkan Agama yang dianut oleh Sri Purnomo saat mencalonkan diri sebagai Bupati pada tahun 2010 dan 2015.

Secara teoritis, Ivancevich, dkk (2005) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai sebuah studi perilaku, sikap dan kinerja manusia dalam lingkungan organisasi serta agama dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya yakni Dengan menggunakan logika pembilahan sosial berdasarkan agama dan hasil studi Geertz tentang konsep aliran dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang, maka seorang muslim cenderung untuk memilih partai atau kandidat yang berplatform Islam dibandingkan dengan yang berplatform agama lain (Nashir, 1998). Organisasi dan agama termasuk faktor-faktor sosiologis yang diyakini mampu mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Agama diyakini sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih

partai politik atau kandidat tertentu. Dalam studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Rose & Urwin, 1969) menyebutkan bahwa agama telah menjadi basis sosial dukungan partai politik di enam belas Negara demokrasi barat. (dikutip oleh Dalton, 2002: hal.155).

Dalam konteks Indonesia, pemilahan politik yang dikaitkan dengan agama telah hadir sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di awal gerakan kemerdekaan telah muncul Sarekat Dagang Islam yang mewakili komunitas Islam dan di sisi lain hadir Boedi Oetomo dan Indische Partij yang sekuler. Demikian halnya pada Pemilu Tahun 1955, partai-partai politik yang berkompetisi memiliki ideologi partai yang cukup jelas, ada Partai Islam, Kristen, dan sekuler. Dan pada Pemilu-Pemilu berikutnya partai Islam ada yang tetap menggunakan ideology Islam, ada juga yang menggunakan ideologi Pancasila namun memiliki basis massa dari organisasi keIslaman tertentu (Nashir, 1998).

Agama dan partisi memilih memiliki relasi yang kuat, sehingga hubungan antara tingkat keberagaman dan voting menjadi kajian (Green & Gerber, 2015). Studi di Amerika partisipasi dalam voting memiliki korelasi yang kuat dengan religiusitas. Alasan penting mengapa terdapat korelasi keberagaman memiliki korelasi dengan perilaku elektoral; pertama, partisipasi dalam organisasi keagamaan akan membangun ketrampilan kewargaan dan lebih lanjut meningkatkan partisipasi politik dan kedua, aktivitas dalam organisasi

keagamaan meningkatkan penyerapan informasi politik dibandingkan dengan yang tidak aktif (Green & Gerber, 2015). Studi ini lebih memfokuskan perilaku elektoral warga Muhammadiyah terutama dalam pemilihan kepala daerah. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2004, elit lokal banya yang memasuki politik elektoral, seperti elit bisnis, elit partai politik, birokrat lokal, kularga kaya dan elit organisasia keagamaan (Hadiz, 2011; Hidayat, 2007; Savirani, 2004). Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_4 - Z_2$  sebesar 0.599 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 6 dapat diterima.

Informasi politik menjadi sangat penting untuk menentukan suatu pilihan, karena informasi yang sebanyak-banyaknya akan mampu menambah wawasan serta referensi kita dalam memilih sesuatu hal, dan dalam hal ini adalah pilihan politik. Untuk melihat jawaban dari responden terhadap indikator Informasi politik yang diterima oleh pimpinan muhammadiyah sleman mengenai pasangan calon yang maju sebagai calon Bupati Sleman pada tahun 2010 dan 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Kategori	Informasi Politik	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Memadai	37	18,6%
Memadai	84	42,2%
Cukup Memadai	66	33,2%
Kurang Memadai	12	6%
Tidak memadai	0	0%
Jumlah	199	100 %

*Sumber : Data diolah Penulis, 2018*

#### **Tabel 4.10 Variabel Informasi Politik**

Pada tabel 4.10. dapat dilihat bahwa informasi politik yang didapatkan saat pilkada tahun 2010 dan 2015 responden menjawab dengan jawaban Sangat Memadai ada sebanyak 37 responden atau 18,6%. Untuk responden yang memberikan jawaban Memadai ada sebanyak 84 responden atau 42,2%. Selanjutnya responden yang memberikan jawaban Cukup Memadai adalah sebanyak 66 orang atau 33,2%. Namun, ada beberapa responden yang masih menjawab Kurang Memadai dalam mendapatkan informasi Politik ada sebanyak 12 responden atau 6%.

Terlihat dalam Tabel 4.10. mengenai Informasi politik diatas ternyata memang pada dasarnya adalah pimpinan Muhammadiyah telah mendapatkan Informasi politik yang memadai mengenai pasangan calon Bupati Kabupaten Sleman pada tahun 2010 dan 2015. Pimpinan Muhammadiyah Sleman pada dasarnya sudah mengenal dan mengetahui *track record* dari Sri Purnomo serta prestasi-prestasi yang dimiliki sebelumnya. Informasi politik yang didapatkan juga sangat mudah karena memang pimpinan Muhammadiyah Sleman tersebut sebelumnya sudah ada kesepahaman bersama mengenai Calon yang akan dipilih adalah berasal dari Kader Muhammadiyah itu sendiri, yang mana memang harus didukung sepenuhnya untuk menjadi Bupati Sleman pada tahun 2010 dan 2015.

Secara teoritis faktor Informasi Politik dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya bahwa ada peran media

sosial (tempat diperoleh informasi) terhadap terbentuknya perilaku pemilih pemula pada Pemilihan walikota Manado tahun 2016. Frekuensi pengiriman pesan adalah salah satu faktor yang penting untuk di perhatikan dalam megunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik. Pemilih pemula adalah pemilih yang aktif menggunakan media sosial sehingga media sosial adalah saluran yang tepat untuk memberikan stimulus kepada mereka (Elise E Haloho, Max Rembang, Grace Waleleng. 2016). Penggunaan media sosial bisa membangkitkan kembali keterlibatan publik dalam diskursus isu-isu politik dan kebijakan publik. Catatannya, pembentukan komunitas-komunitas maya perlu diiringi dengan agenda turun ke bawah untuk memastikan ketertarikan politik warga (political ephicacy). Jika ketertarikan sudah muncul, partisipasi warga dalam politik akan melampaui partisipasi konvensional. Dalam arti, warga terlibat lebih jauh dengan melakukan serangkaian aktivitas politik seperti mengikuti kampanye dan tidak hanya memberikan suara saat pemilihan (Utomo, 2013) . Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_5 - Z_2$  sebesar 0.657 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima. Secara teoritis, agama dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya (Fukuyama, 2000) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan

stabilitas demokrasi. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Fukuyama, Francis. 1999. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam).

Kami menyoroti dua dimensi modal sosial yang berkontribusi pada informasi pemilih. Pertama, keterlibatan warga negara yang lebih besar menuntun seseorang untuk lebih memperhatikan peristiwa di komunitasnya, dan khususnya untuk politik. Dengan demikian, (Putnam, 1993) menganggap pembaca surat kabar sebagai proxy langsung untuk modal sosial. Kedua, tingkat kepercayaan dan hubungan sosial yang lebih tinggi menyiratkan bahwa individu adalah bagian dari jaringan tetangga yang lebih luas. Hubungan interpersonal yang didukung oleh rasa saling percaya memungkinkan agen untuk membagi secara kredibel informasi yang dimiliki masing-masing. Interaksi sosial seperti itu memainkan peran kunci dalam perolehan pengetahuan politik (Beck, 2002; Cialdini, 1984; Granovetter, 1983; Zaller, 1992) dalam (Ponzetto & Troiano, 2018).

Modal sosial merupakan sesuatu hal yang kita miliki dalam kehidupan sosial bermasyarakat dilingkungan sekitar yang tidak bisa kita gambarkan wujudnya. Karena modal sosial pada dasarnya ada terdapat dalam suatu kepercayaan, norma dan jaringan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat bagaimana modal

sosial mempengaruhi dalam perilaku pemilih pada Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015, dapat dilihat pada table 4.8 dibawah ini:

Kategori	Modal Sosial	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	54	27,1%
Setuju	104	52,3%
Cukup Setuju	25	12,6%
Kurang Setuju	10	5%
Tidak Setuju	6	3%
Jumlah	199	100 %

*Sumber : Data diolah Penulis, 2018*

#### **Tabel 4.11 Variabel Modal Sosial**

Pada table 4.11 dapat dilihat bahwa Responden yang menjawab bahwa Modal sosial akan mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada Sleman pada tahun 2010 dan 2015 dengan jawaban Sangat Setuju ada sebanyak 54 Responden atau 27,1%. Selanjutnya responden dengan jawaban Setuju ada sebanyak 104 responden atau 52,3%. Untuk responden yang menjawab dengan jawaban Cukup Setuju ada sebanyak 25 orang atau 12,6%.

Tidak bisa dipungkiri responden juga masih ada yang memberikan jawaban bahwa Kurang Setuju modal sosial dapat mempengaruhi perilaku memilih sejumlah 10 orang atau 5%. Sedangkan responden yang menjawab dengan jawaban Tidak Setuju ada sebanyak 6 orang atau 3%.

Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sebagian besar Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor penyebab memilih dalam Pilkada Sleman taun 2010 dan 2015 yang lalu. Terlihat dalam hasil frekuensi pada table 4.8 sebagian besar Pimpinan Muhammadiyah menjawab dengan jawaban sangat setuju dan Setuju bahwa mereka memilih calon Bupati sleman karena adanya kepercayaan yang tinggi dan kemampuan yang dimiliki oleh Sri Purnomo selaku calon Bupati. Sri purnomo mengatakan:

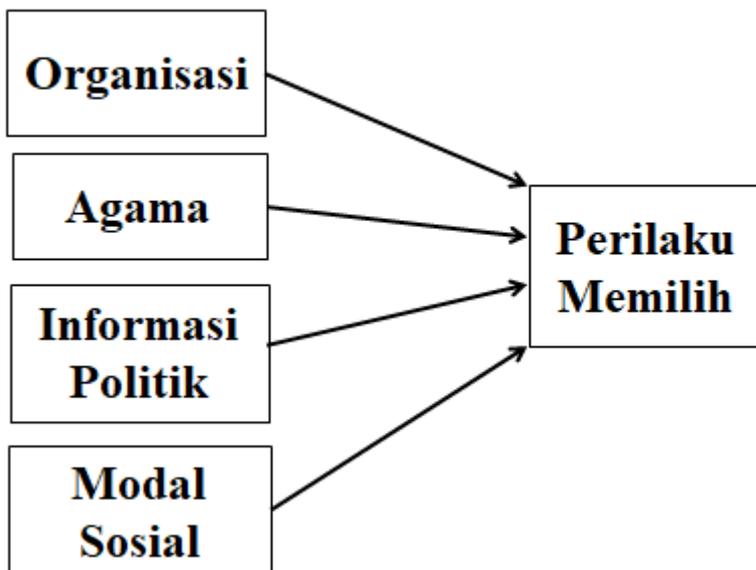
*“untuk menjadi seorang calon bupati tentunya ini memiliki banyak pertimbangan. Tentu masyarakat akan sangat melihat dari sisi background seorang calon tersebut dan juga riwayat pendidikannya. Ini menjadi hal yang lumrah dan tentu wajib menjadi dasar pemilih untuk dapat memilih dengan baik. Dengan adanya keingintahuan seorang pemilih tersebut tentu akan menjadi dasar bagi pemilih itu sendiri untuk menggunakan haknya dalam memilih calon kepala daerah”*

Begitu juga halnya, Sri Purnomo menjelaskan bahwa dalam organisasi Muhammadiyah tentunya akan menciptakan kader-kader baru yang dapat menjadikan regenerasi menjadi Bupati karena dalam organisasi muhammadiyah ini juga mempunyai kontribusi dukungan yang sangat kuat dan juga kader muhammadiyah harus terjun dan mengetahui maupun terlibat dalam politik praktis. Sri purnomo juga mengatakan bahwa tidak hanya menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah saja yang dapat menjalankan moral social dalam islam seperti sidiq, amanah, tabligh dan fathonah tetapi masyarakat juga harus memiliki hal tersebut untuk dapat memilih pemimpin yang baik dan dapat menjalankan amanah dari masyarakat. Maka hal ini

mempunyai dua pengaruh baik itu muncul dalam diri seorang pemimpin maupun perilaku seorang pemilih.

#### **4.4. Uji Model dan Hipotesis**

Dugaan awal dalam penelitian dan pengolahan data adalah bahwa perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada 2010 dan 2015 adalah dipengaruhi oleh 4 variabel yakni variabel organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial. Sehingga sesuai dengan model pendekatan maka kerangka pemikiran atau pendekatannya menggunakan model seperti ada pada gambar di bawah ini.



### **Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran**

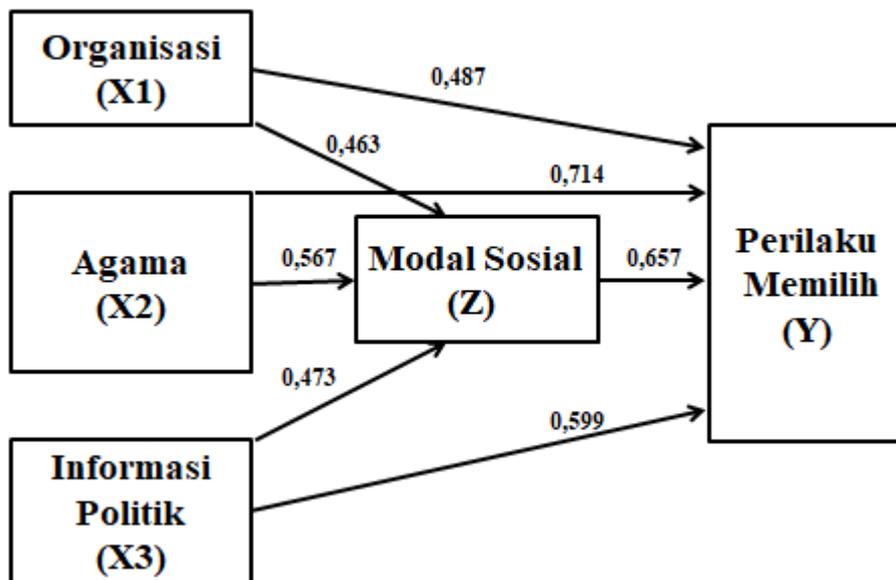
Dengan gambar di atas terprediksi bahwa :

1. Variabel organisasi memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah.
2. Variabel agama memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah
3. Variabel informasi politik memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah
4. Variabel modal sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah
5. Keempat variabel tersebut secara terpisah mempengaruhi perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah
6. Sehingga terasumsikan bahwa keempat variabel tersebut adalah variabel independen, sementara perilaku memilih sebagai variabel dependen atau terpengaruh.

Setelah pengolahan data dan pengujian dengan model gambar di atas, ternyata modal sosial bukanlah variabel independen yang berdiri sendiri sebagaimana variabel yang lain, tetapi menjadi variabel penghubung atau variabel antara yang menghubungkan variabel organisasi, agama, dan informasi politik terhadap perilaku memilih. Akan tetapi pada saat yang sama, ternyata variabel organisasi, agama, informasi politik, masing-masing juga berpengaruh langsung terhadap perilaku memilih. Sebab itu penjelasan hubungan variabel dan pengolahan data menjadi seperti di bawah ini:

1. Variabel organisasi memiliki pengaruh terhadap variabel modal sosial
2. Variabel agama memiliki pengaruh terhadap modal sosial
3. Variabel informasi politik memiliki pengaruh terhadap variabel modal sosial

4. Variabel modal sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih
5. Variabel agama memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah
6. Variabel informasi politik memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku memilih



**Gambar 4.2 Hasil Uji Model Validasi SEM**

Berdasarkan dengan hasil uji coba model validasi menggunakan SEM, hasil ini menunjukkan bahwa faktor agama, informasi politik dan modal sosial akan mempengaruhi perilaku

pemilih pada pemilukada di Sleman tahun 2010 dan 2015. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa faktor organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan akan perilaku pemilih.

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Modal	<---	Organisasi	-,272	,076	-3,557	***	
Modal	<---	Agama	-,048	,157	-,304	,761	
Modal	<---	Informasi	,006	,065	,090	,928	
Perilaku	<---	Modal	,644	,178	3,610	***	

**Tabel 4.11 Parameter Variabel Independen**

Diketahui bahwa variable tersebut memiliki pengaruh yang signifikan karena *P value* yang dimiliki lebih dari 0,5 maka hasilnya adalah signifikan bahwa faktor organisasi, agama, dan informasi akan mempengaruhi modal sosial seorang pemimpin, begitu juga dengan modal yang dimiliki oleh pemimpin sangat signifikan terhadap perilaku pemilih.

## **4.5 Analisis Variabel Bebas dan Terikat**

### **4.5.1 Hubungan dan Pengaruh Organisasi terhadap Modal Sosial**

H<sub>1</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor organisasi ( $x_1$ ) terhadap modal sosial ( $Z$ ). Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_1$ - $Z$  sebesar 0.463 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 1 dapat diterima. Secara teoritis keaktifan didalam organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah mempengaruhi modal sosial. Temuan ini sejalan

dengan temuan sebelumnya yang menjelaskan bahwa aktivisme akan menyebabkan tingkat kepercayaan yang baik pada organisasi dan kepercayaan pada orang lain (Koh et al., 2016). Dari wawancara dengan responden sebagai berikut.

*Kami aktif di Muhammadiyah akan menyebabkan tingkat kepercayaan antara kami semakin meningkat dan tidak hanya berorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi juga dengan tujuan untuk mencapai keutamaan di akhirat melalui organisasi Muhammadiyah” (Interview Res 1).*

Temuan ini mengkonfirmasi temuan dari (Louis, Amiot, Thomas, & Blackwood, 2016) bahwa partisipasi dalam organisasi akan meningkatkan aktivisme dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian.

#### **4.5.2 Hubungan dan Pengaruh Faktor Agama Terhadap Modal Sosial**

H<sub>2</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor agama dengan modal social. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi X<sub>1</sub>-Z sebesar 0.567 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis dapat diterima. Secara teoritis keaktifan didalam organisasi keagamaan, seperti beragamnya aktifitas Muhammadiyah mempengaruhi modal sosial yang dimiliki organisasi ini. Muhammadiyah, dengan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) misalnya, kegiatan LPB benar-benar dirasakan manfaatnya termasuk dalam rangka membangun keakraban yang pada gilirannya

menjadi “gizi ampuh” kuat dan keberadaannya modal sosial. Sri Purnomo selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan:

*“dalam sebuah komunitas sosial tentunya ikatan batin, peningkatan keakraban, bantuan dan peran sosial lainnya tentu akan mendapatkan timbal balik dalam tindakan sosial juga. Ini juga memang dirasakan oleh masyarakat apalagi berkaitan dengan agama yang menjadi modal dalam membentuk identitas diri secara bersama-sama”*

Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menjelaskan bahwa ikatan dalam komunitas atau jamaah, membangun timbal balik dalam jamaah, meningkatkan keakraban, sokongan atau bantuan karena krisis atau bencana. Artinya bahwa, peranan modal sosial ikatan dalam komunitas ialah untuk pembentukan identitas secara bersama, membangunkan timbal balik dalam komunitas, meningkatkan keakraban, sokongan sosial dan bantuan ketika krisis (Gittell & Vidal, 1998).

#### **4.5.3 Hubungan Pengaruh Faktor Informasi Politik sebagai Modal Sosial**

H<sub>3</sub>. Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor informasi politik sebagai modal sosial dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_3 - Z$  sebesar 0.473 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 3 dapat diterima. Secara teoritis informasi politik yang memadai dan akurat terkait pilkada Sleman 2010 dan 2015

mempengaruhi modal sosial yang ada di Muhammadiyah. Hal demikian sejalan dengan temuan sebelumnya, Denton & Woodward ((McNair, 2003), dalam Sandra, L.J, 2013), mengatakan bahwa komunikasi politik adalah diskusi murni tentang alokasi sumber daya publik, otoritas resmi, dan undang-undang resmi. Selain itu komunikasi politik juga dilihat sebagai proses interaktif yang berfokus pada transmisi informasi diantara politisi, media dan publik. Jalaluddin Rakhmat (dalam (Hikmat, 2018)) menegaskan, ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. *He doesn't communicate what he says, he communicates what he is*. Ia tidak dapat menyuruh komunikan hanya memperhatikan apa yang ia katakan, komunikan juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Abdul Cholid Muhtar selaku ketua PDM Sleman menjelaskan bahwa informasi politik mempengaruhi modal sosial yang dimiliki oleh kepala daerah.

*“modal utama seorang pemimpin kan pasti dengan bekal informasi politik karena akan menjadi bekal yang akan dibawa oleh seorang pemimpin tersebut dalam bermasyarakat. Kekuatan politik juga menjadi alat komunikasi yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain”*

(Berlo, 1960) memandang pesan dari sisi fungsionalnya. Ia tidak mengkategorikan pesan itu dalam konteks bentuknya. Menurutnya, yang terpenting dalam proses komunikasi dinamakan pesan jika memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Menurutnya, siapapun yang berkomunikasi memiliki tujuan pokok untuk menjadi

pelaku yang mampu mempengaruhi; mempengaruhi orang lain; lingkungan fisik pemberi pesan; dan pemberi pesan sendiri, sehingga pesan itu sesuatu yang memberikan efek. Pengetahuan politik, pada gilirannya, sangat penting untuk mempromosikan partisipasi aktif dalam proses politik (Carpini & Keeter, 1996; Jennings & Watts, 1996) Pengetahuan politik ini dapat diperoleh melalui pendidikan, diskusi interpersonal, dan media berita (Kenski & Stroud, 2006).

H<sub>4</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor organisasi dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_4 - Z_2$  sebesar 0.487 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima. Setiap masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi itu berarti mereka memiliki suatu tujuan bersama dan ditampung dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi.

Jadi pada indikator Organisasi sebagai salah satu faktor dalam memilih saat Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Organisasi Muhammadiyah dan Sri Purnomo sebagai salah satu Pimpinan Muhammadiyah. Maka dapat dijelaskan bahwa masih ada kecenderungan memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman pada tahun 2010 dan 2015 karena faktor Organisasi.

Secara teoritis, Ivancevich, dkk (2005) mendefinisikan perilaku organisasi sebagai sebuah studi perilaku, sikap, dan kinerja manusia

dalam lingkungan organisasi; berdasarkan teori, metode, dan prinsip dari disiplin seperti Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi Budaya dan Politik untuk belajar mengenai persepsi individu, nilai, dan tindakan bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara total; menganalisis dampak lingkungan eksternal terhadap organisasi dan sumber daya manusia, tujuan, dan strategi organisasi.

Pada organisasi yang telah memiliki tujuan bersama dalam yang menjadikan landasan untuk menjalankan organisasi tersebut sebenarnya telah menjelaskan hakikat organisasi yang memiliki sifat berkelompok, baik dalam ikatan hidup bermasyarakat, maupun menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan formal yang tersusun dan tertata, sedangkan sifat dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah ada sejak lahir (Soekanto, 1977:94)

Faktor dasar yang akan mempererat tali kekeluargaan antara anggota dalam suatu kelompok organisasi kemasyarakatan adalah adanya kebersamaan, senasib sepenanggungan, guna mencapai tujuan bersama. Maka dari itu suatu organisasi dapat membentuk perilaku memilih karena telah memiliki rasa kebersamaan yang kuat demi mewujudkan apa yang ingin dicapainya.

H<sub>5</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor agama dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_5 - Z_2$  sebesar 0.714 dan

significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 4 dapat diterima.

Agama dijadikan salah satu indikator dalam penelitian ini karena memang sebagai Indonesia yang terdiri dari beberapa Agama yang diakui oleh Negara serta mampu juga dalam mempengaruhi perilaku memilih di masyarakat. Maka dari itu pada tabel 4.6 dibawah ini akan menyajikan data mengenai indikator Agama terhadap perilaku memilih pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Sleman pada Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015, sebagai berikut :

Kategori	Agama	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	107	53,8%
Setuju	82	41,2%
Cukup Setuju	8	4%
Kurang Setuju	2	1%
Tidak Setuju	0	0
Jumlah	199	100 %

Sumber : Data diolah Penulis, 2018

#### **Tabel 4.12 Variabel Agama**

Pada tabel 4.12 dapat terlihat bahwa adanya kecenderungan yang sangat besar para pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam memilih Sri Purnomo karena berdasarkan Agamanya. Terlihat dari jawaban Responden yang menyatakan Sangat Setuju dalam memilih calon pemimpin berdasarkan Agamanya sebanyak 107 orang atau 53,8%. Jumlah ini sudah mencapai lebih dari setengah responden yang memberikan jawaban tersebut. Selanjutnya jawaban Setuju ada sebanyak 82 orang atau 41,2% memilih Agama sebagai salah satu faktor dalam memilih. Serta Responden yang menjawab Cukup Setuju ada sebanyak 8 orang atau 4%. Abdul Cholid Muhtar menjelaskan bahwa :

*“faktor agama ini menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap pemimpin. Apalagi saat menjadi seorang kepala daerah, faktor agama ini yang sangat mempengaruhi sudut pandang masyarakat akan pemimpin mereka nantinya”*

Untuk responden yang menjawab dengan jawaban Kurang Setuju ada sebanyak 2% dan tidak ada responden yang memberikan Jawaban Tidak Setuju. Maka dari itu dapat terlihat hampir

keseluruhan Jawaban dari Responden Sangat Setuju dan Setuju bahwa Faktor agama menjadi indikator dalam melakukan Pilkada tahun 2010 dan 2015 yang lalu.

Hal tersebut tidak terlepas dari Calon Bupati saat ini Sri Purnomo yang beragama mayoritas di Sleman yaitu Islam yang mencalonkan diri. Sri Purnomo juga sudah dikenal sebagai salah satu Pengurus Ormas Islam terbesar yang ada yaitu Muhammadiyah, maka dari itu sangat tidak heran jika para Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sleman juga mempertimbangkan Agama yang dianut oleh Sri Purnomo saat mencalonkan diri sebagai Bupati pada tahun 2010 dan 2015.

Secara teoritis, agama dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya yakni Dengan menggunakan logika pembilahan sosial berdasarkan agama dan hasil studi Geertz tentang konsep aliran dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang, maka seorang muslim cenderung untuk memilih partai atau kandidat yang berplatform Islam dibandingkan dengan yang berplatform agama lain (*dalam (Nashir, 1998)*). Organisasi dan agama termasuk faktor-faktor sosiologis yang diyakini mampu mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Agama diyakini sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau kandidat tertentu. Dalam studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Rose & Urwin, 1969) menyebutkan bahwa agama telah menjadi basis

sosial dukungan partai politik di enam belas Negara demokrasi barat. (dikutip oleh Dalton, 2002: hal.155).

Dalam konteks Indonesia, pemilahan politik yang dikaitkan dengan agama telah hadir sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di awal gerakan kemerdekaan telah muncul Sarekat Dagang Islam yang mewakili komunitas Islam dan di sisi lain hadir Boedi Oetomo dan Indische Partij yang sekuler. Demikian halnya pada Pemilu Tahun 1955, partai-partai politik yang berkompetisi memiliki ideologi partai yang cukup jelas, ada Partai Islam, Kristen, dan sekuler. Dan pada Pemilu-Pemilu berikutnya partai Islam ada yang tetap menggunakan ideology Islam, ada juga yang menggunakan ideologi Pancasila namun memiliki basis massa dari organisasi keIslaman tertentu (Nashir, 1998).

Agama dan partisi memilih memiliki relasi yang kuat, sehingga hubungan antara tingkat keberagaman dan voting menjadi kajian (Green & Gerber, 2015). Studi di Amerika partisipasi dalam voting memiliki korelasi yang kuat dengan religiusitas. Alasan penting mengapa terdapat korelasi keberagaman memiliki korelasi dengan perilaku elektoral; pertama, partisipasi dalam organisasi keagamaan akan membangun ketrampilan kewargaan dan lebih lanjut meningkatkan partisipasi politik dan kedua, aktivitas dalam organisasi keagamaan meningkatkan penyerapan informasi politik dibandingkan dengan yang tidak aktif (Green & Gerber, 2015). Studi ini lebih memfokuskan perilaku elektoral warga Muhammadiyah terutama

dalam pemilihan kepala daerah. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2004, elit lokal banya yang memasuki politik elektoral, seperti elit bisnis, elit partai politik, birokrat lokal, kularga kaya dan elit organisasia keagamaan (Hadiz, 2011; Hidayat, 2007; Savirani, 2004).

H<sub>6</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor informasi politik dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_4 - Z_2$  sebesar 0.599 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 6 dapat diterima. Informasi politik menjadi sangat penting untuk menentukan suatu pilihan, karena informasi yang sebanyak-banyaknya akan mampu menambah wawasan serta referensi kita dalam memilih sesuatu hal, dan dalam hal ini adalah pilihan politik. Untuk melihat jawaban dari responden terhadap indikator Informasi politik yang diterima oleh pimpinan muhammadiyah sleman mengenai pasangan calon yang maju sebagai calon Bupati Sleman pada tahun 2010 dan 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Kategori	Informasi Politik	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Memadai	37	18,6%
Memadai	84	42,2%
Cukup Memadai	66	33,2%
Kurang Memadai	12	6%
Tidak memadai	0	0%

Jumlah	199	100 %
--------	-----	-------

Sumber : Data diolah Penulis, 2018

**Tabel 4.13 Variabel Informasi Politik**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa informasi politik yang didapatkan saat pilkada tahun 2010 dan 2015 responden menjawab dengan jawaban Sangat Memadai ada sebanyak 37 responden atau 18,6%. Untuk responden yang memberikan jawaban Memadai ada sebanyak 84 responden atau 42,2%. Selanjutnya responden yang memberikan jawaban Cukup Memadai adalah sebanyak 66 orang atau 33,2%. Namun, ada beberapa responden yang masih menjawab Kurang Memadai dalam mendapatkan informasi Politik ada sebanyak 12 responden atau 6%.

Terlihat dalam Tabel 4.13. mengenai Informasi politik diatas ternyata memang pada dasarnya adalah Pimpinan Muhammadiyah telah mendapatkan Informasi politik yang memadai mengenai pasangan calon Bupati Kabupaten Sleman pada tahun 2010 dan 2015. Pimpinan Muhammadiyah Sleman pada dasarnya sudah mengenal dan mengetahui *track record* dari Sri Purnomo serta prestasi-prestasi yang dimiliki sebelumnya. Informasi politik yang didapatkan juga sangat mudah karena memang Pimpinan Muhammadiyah Sleman tersebut sebelumnya sudah ada kesepahaman bersama mengenai Calon yang akan dipilih adalah berasal dari Kader Muhammadiyah itu sendiri, yang mana memang harus didukung sepenuhnya untuk menjadi Bupati Sleman pada tahun 2010 dan 2015.

Secara teoritis faktor Informasi Politik dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya bahwa ada peran media sosial (tempat diperoleh informasi) terhadap terbentuknya perilaku pemilih pemula pada Pemilihan walikota Manado tahun 2016. Frekuensi pengiriman pesan adalah salah satu faktor yang penting untuk di perhatikan dalam menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik. Pemilih pemula adalah pemilih yang aktif menggunakan media sosial sehingga media sosial adalah saluran yang tepat untuk memberikan stimulus kepada mereka (Elise E Haloho, Max Rembang, Grace Waleleng. 2016). Penggunaan media sosial bisa membangkitkan kembali keterlibatan publik dalam diskursus isu-isu politik dan kebijakan publik. Catatannya, pembentukan komunitas-komunitas maya perlu diiringi dengan agenda turun ke bawah untuk memastikan ketertarikan politik warga (political efficacy). Jika ketertarikan sudah muncul, partisipasi warga dalam politik akan melampaui partisipasi konvensional. Dalam arti, warga terlibat lebih jauh dengan melakukan serangkaian aktivitas politik seperti mengikuti kampanye dan tidak hanya memberikan suara saat pemilihan (Utomo, 2013).

H<sub>7</sub>: Ada hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor modal sosial dengan perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015. Dari uji korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi  $X_5 - Z_2$  sebesar 0.657 dan significant pada level 0.01. Dengan demikian hipotesis 4

dapat diterima. Secara teoritis, agama dapat memengaruhi perilaku memilih sesuai temuan sebelumnya (Fukuyama, 2000) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Fukuyama, F. 1999. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam).

Kami menyoroti dua dimensi modal sosial yang berkontribusi pada informasi pemilih. Pertama, keterlibatan warga negara yang lebih besar menuntun seseorang untuk lebih memperhatikan peristiwa di komunitasnya, dan khususnya untuk politik. Dengan demikian, (Putnam, 1993) menganggap pembaca surat kabar sebagai proxy langsung untuk modal sosial. Kedua, tingkat kepercayaan dan hubungan sosial yang lebih tinggi menyiratkan bahwa individu adalah bagian dari jaringan tetangga yang lebih luas. Hubungan interpersonal yang didukung oleh rasa saling percaya memungkinkan agen untuk membagi secara kredibel informasi yang dimiliki masing-masing. Interaksi sosial seperti itu memainkan peran kunci dalam perolehan

pengetahuan politik (Beck, 2002; Cialdini, 1984; Granovetter, 1983; Zaller, 1992) dalam (Ponzetto & Troiano, 2018).

Modal sosial merupakan sesuatu hal yang kita miliki dalam kehidupan sosial bermasyarakat dilingkungan sekitar yang tidak bisa kita gambarkan wujudnya. Karena modal sosial pada dasarnya ada terdapat dalam suatu kepercayaan, norma dan jaringan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat bagaimana modal sosial mempengaruhi dalam perilaku pemilih pada Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015, dapat dilihat pada table 4.8 dibawah ini:

Kategori	Modal Sosial	
	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	54	27,1%
Setuju	104	52,3%
Cukup Setuju	25	12,6%
Kurang Setuju	10	5%
Tidak Setuju	6	3%
Jumlah	199	100 %

*Sumber : Data diolah Penulis, 2018*

#### **4.14 Variabel Modal Sosial**

Pada table 4.14 dapat dilihat bahwa Responden yang menjawab bahwa Modal sosial akan mempengaruhi perilaku memilih dalam Pilkada Sleman pada tahun 2010 dan 2015 dengan jawaban Sangat Setuju ada sebanyak 54 Responden atau 27,1%. Selanjutnya responden dengan jawaban Setuju ada sebanyak 104 responden atau 52,3%. Untuk responden yang menjawab dengan jawaban Cukup Setuju ada sebanyak 25 orang atau 12,6%.

Tidak bisa dipungkiri responden juga masih ada yang memberikan jawaban bahwa Kurang Setuju modal sosial dapat mempengaruhi perilaku memilih sejumlah 10 orang atau 5%. Sedangkan responden yang menjawab dengan jawaban Tidak Setuju ada sebanyak 6 orang atau 3%.

Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sebagian besar Pimpinan Muhammadiyah menyatakan bahwa modal sosial menjadi salah satu faktor penyebab memilih dalam Pilkada Sleman tahun 2010 dan 2015 yang lalu. Terlihat dalam hasil frekuensi pada table 4.8 sebagian besar Pimpinan Muhammadiyah menjawab dengan jawaban sangat setuju dan Setuju bahwa mereka memilih calon Bupati sleman karena adanya kepercayaan yang tinggi dan kemampuan yang dimiliki oleh Sri Purnomo selaku calon Bupati.

#### **4.6 Implikasi Teoritik**

Sebelum mengupas dan merumuskan implikasi teoritik, perlu ditegaskan ulang bahwa penelitian ini diawali dan dituntun dengan rumusan masalah “Bagaimana Perilaku Memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada tahun 2010 dan 2015? Setelah diperoleh data secara cukup maksimal tentang penelitian ini, maka diperoleh jawaban bahwa para pemilih dalam pilkada Kabupaten Sleman yang terjadi pada tahun 2010 dan 2015 dipengaruhi prinsip-prinsip organisasi keagamaan (Muhammadiyah), agama (Islam), informasi politik yang diterima, modal sosial organisasi (Muhammadiyah), bukan dipengaruhi oleh uang atau yang lebih

terkenal dengan istilah politik uang. Di bawah ini adalah beragam bukti bahwa di banyak tempat telah terjadi politik.

Ketika masa jabatannya berakhir pada tahun 2005, Ibnu Subiyanto tidak mau berpasangan lagi dengan Zailani karena memandang bahwa wakilnya itu terlalu lamban dalam membuat kebijakan. Ibnu lalu menggandeng Sri Purnomo yang didukung partai PAN. Sri Purnomo adalah seorang guru sekolah menengah yang tampaknya oleh Ibnu dipandang lebih lunak dan moderat terutama mengenai pendiriannya tentang "proyek-proyek strategis". Pada masa kampanye, banyak yang sebenarnya sudah mempertanyakan alokasi dana yang mencurigakan dari anggaran pemerintah daerah. Dari sumber anggaran yang disebut "dana gotong-royong", Pemda mengalokasikan pembagian drum aspal (yang masing-masing senilai Rp 4 juta) ke desa-desa di kabupaten ini. Masalahnya adalah bahwa di atas drum-drum aspal yang dibagikan itu terdapat label dengan tulisan "Ibnu Subiyanto, Calon Nomor 1".<sup>21</sup> Ini tentu dapat dikategorikan sebagai politik uang yang sifatnya tidak langsung. Dalam hal politik uang catatan dari Indonesian Corruption Watch juga menemukan bahwa koalisi partai politik di Sleman telah menarik sumbangan sebesar Rp 10 juta dari setiap Balon Bupati dan Wakil Bupati serta sejumlah Rp 10 juta yang lain sebagai biaya kampanye (ICW, 2005, dalam Kumorotomo, Wahyudi. "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung."

Makalah disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya 15 (2009).

Kisruh internal di tubuh Partai Demokrat tampaknya belum ada tanda-tanda bakal mereda. Alih-alih, persoalan demi persoalan terus bermunculan. Setelah digoyang oleh isu penonaktifan Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat kini muncul isu politik uang (*vote's buying*) dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada 2010 yang lalu. Isu tersebut terus berhembus seiring dengan mulai mengemukanya pengakuan sejumlah kader Demokrat yang menerima uang agar memilih Anas sebagai ketua umum. Merebaknya isu politik uang dalam Kongres Partai Demokrat tentu saja mengundang sejumlah pertanyaan. Mengapa masalah ini baru diungkap sekarang padahal kejadiannya sudah berlangsung sejak kurang lebih dua tahun yang lalu? Apakah ini merupakan bentuk lain dari tekanan terhadap Anas yang tetap tidak bersedia mengundurkan diri dari posisi ketua umum? Kalau benar, tidakkah langkah ini justru akan membuat citra Demokrat semakin merosot di mata publik?

Berkaitan dengan model politik uang yang terjadi selama pemilu 2014, kebanyakan dalam bentuk pemberian barang sembako, souvenir dan hibah dana kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum di lingkungannya. Namun terdapat modifikasi bentuk politik uang dalam bentuk yang lebih formal yaitu dengan pembuatan kontrak antara pemilih dengan caleg. Cara kerjanya adalah caleg menawarkan kontrak dengan masyarakat tertentu di kabupaten

Blora, jika masyarakat bersedia, maka masyarakat membuat kesepakatan dengan caleg untuk memberi dukungan kepada caleg tersebut dengan jumlah suara minimal yang disepakati sebelumnya. Apabila masyarakat mampu memberikan dukungan lebih dari batas minimal tersebut maka caleg wajib untuk memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Selebihnya politik uang di kabupaten Blora diwarnai dengan pola transaksi berupa pemberian uang kepada pemilih dan masih ada caleg yang melakukan serangan fajar. Secara umum, masyarakat di Kabupaten Blora lebih di pengaruhi oleh pencitraan dan transaksi dalam mengambil keputusan dalam memilih hal ini seperti yang dijelaskan dalam pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seoran pekerja lepas “...saya pribadi lebih tertarik pada sikapnya sewaktu kampanye dan jumlah nominal uang yang saya dapat. Walaupun itu bukan pertimbangan utama namun menjadi salah satu pertimbangan saya dalam menentukan pilihan...” (Hasil Wawancara 14 September 2015. Dendy Lukmajati, 2)

Pilkada di kabupaten Bireuen tahun 2017 telah terjadi pelanggaran pidana terkait money politic, praktik politik uang ini berhasil diungkap oleh Panwaslih kabupaten Bireuen berdasarkan laporan Zulfikar Muhammad. Pelaku money politic yang dilakukan Rini Yati Bin Hamzah Abdullah, di gampong Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Praktik politik yang terjadi telah dilaporkan ke Panwaslih Bireuen dan sudah sampai ke Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pihak Panwaslih Bireuen

telah melakukan upaya dalam mengungkap kasus politik uang yang terjadi di Bireuen. Pilkada sangat krusial dan sangat berpotensi berjalan tidak sesuai dengan harapan bila tidak diawasi dengan baik dan sungguh-sungguh. Pengawasan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bireuen oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen sudah bekerja dengan cukup baik. Bahkan tercatat tidak kurang 22 (dua puluh dua) pengaduan dari masyarakat yang diterimanya mengenai kasus money politic (Yolanda & Hasan, 2017).

Dengan meminjam istilah Wahyudi Kumorotomo, Idingrhasan Irhas penulis jurnal, Dendy Lukmajati, Rangga Yolanda, Effendi Hasan, dan tentu masih ada peneliti lain yang sama, yang mengatakan bahwa dalam pilkada telah terjadi politik uang dengan beragam bentuknya. Artinya para pemilih telah melakukan tindakan memilih seseorang itu memang terbukti karena uang. Akan tetapi untuk kasus pilkada di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2015, para Pimpinan Muhammadiyah memilih calon kepala daerah justru dipengaruhi oleh bukan uang/materi tetapi disebabkan oleh faktor non materi yakni berupa faktor organisasi (Muhammadiyah), agama (Islam), informasi politik (terkait pilkada dan Muhammadiyah), dan modal sosial (yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Implikasi teoritiknya bahwa politik uang bisa tidak terjadi (paling tidak sangat berkurang) jika yang dipilih dan yang memilih memiliki kesamaan latar belakang organisasi keagamaan yang sama, agama yang sama, informasi politik yang sama

sebagai modal sosial yang diakui bersama menjadi penentu masa depan yang lebih baik untuk semua.

#### **4.7 Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam Pilkada Kabupaten Sleman 2010 dan 2015 tak terhindarkan terjadi pada beberapa aspek. Dari aspek jumlah responden, penelitian ini belum bisa menjangkau pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dan Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA). Jika masing-masing kecamatan memiliki 3 hingga 4 kelurahan dan setiap kelurahan memiliki satu PRM dan satu PRA, maka jumlah PRM se Sleman minimal 51 dan jumlah PRA 51. Jadi jumlah PRM dan PRA 102. Jika secara organisatoris terpenuhi, maka PRM dan PRA masing-masing memiliki minimal 5 Anggota Pimpinan. Dari jumlah 102 PRM dan PRA, maka akan ditemukan jumlah 510 (lima ratus sepuluh) Anggota PRM dan PRA tersebar di Sleman. Jumlah inilah yang menjadi sangat tidak mudah dari teknis penelitiannya. Disatu sisi, Kabupaten Sleman yang diresmikan Hari Jadinya pada 8 Agustus 1950 memiliki luas wilayah 574,8 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 859.327 jiwa. Area seluas itu menjadi tempat tersebarnya tempat tinggal para PRM dan PRA yang harus diteliti.

Dari aspek waktu, masing-masing responden rata-rata membutuhkan 35 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian satu PRM dan PRA jika dipukul rata paling tidak 80 menit perjalanan pulang

balik dan 35 menit menjawab, maka menjadi 115 menit. Jumlah menit ini harus dikalikan lagi dengan 102 jumlah PRM dan PRA. Menit yang digunakan terhitung 11.730 menit. Kelemahan berikut adalah jika PRM dan PRA yang diteliti belum lengkap dan sangat tidak mudah untuk bisa lengkap, maka hal demikian akan memakan waktu yang semakin lama. Satu hari diprediksi berkemampuan meneliti anantara satu hingga dua PRM dan PRA. Karena itu jika rata-rata yang diprediksi tidak mleset, maka penelitian PRM dan PRA se Sleman membutuhkan antar 60 hingga 70 hari. Hari libur dan hari kerja para Anggota PRM dan PRA sangat beragam. Keragaman inilah menjadikan anomaly waktu penelitian dan itu hambatan yang tidak mudah teratasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal non ekonomi. Sebab itu masalah biaya berapa yang harus dikeluarkan, untuk apa digunakan, siapa yang menggunakan, bagaimana pelaporannya, ada tidak penyelewengannya, kapan harus melaporkan, bagaimana solusinya jika terjadi ketidakberesan penggunaan uang, dsb, semuanya itu belum bisa diketahui. Karena Sri Purnomo ini didukung dan digerakkan oleh Muhammadiyah dan partai politik pengusung dan pendukung, maka bagaimana konsekuensi politiknya terhadap keduanya oleh kepala daerah terpilih. Tuntutan Muhammadiyah dan tuntutan parpol sedikit banyak berbeda. Kultur Muhammadiyah dan budaya parpol juga sangat berbeda. Pimpinan Muhammadiyah tentu dibantu calon kepala daerah terpilih dalam

membiyai kampanye, dsb. Hitungan rupiahnya pasti ada, tetapi Muhammadiyah pastilah tidak *petung*. Namun demikian bisa terjadi, adanya oknum dari Muhammadiyah yang berjiwa *petung*. Bagaimana hal demikian pada oknum parpol, publik cukup mengetahui bahwa kultur parpol memang sering terjadi sikap dan perilaku *petung*.